

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Hiburan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolahraga.

Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Mengingat kondisi Kabupaten dan Kota di Indonesia tidak sama, termasuk jenis hiburan yang diselenggarakan. Maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah. Pemerintah Daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan Hukum Operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Daerah Hiburan di daerah Kabupaten atau Kota tersebut.

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

### 2.1.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Menurut undang-undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 tentang Pajak Daerah bahwa:

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tontonan film.
  - b. Pagelaran kesenian, pameran, musik, tari, dan busana.
  - c. Kontes Kecantikan, binaraga, dan sebagainya.
  - d. Pameran.
  - e. Diskotik, karaoke, dan sebagainya.
  - f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
  - g. Permainan biliar, golf dan bowling.
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan
  - j. Pertandingan olahraga.
3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Disebutkan dalam undang-undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 43 menjelaskan bahwa Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

### 2.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan undang-undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Pajak Daerah bahwa:

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Telah disebutkan dalam undang-undang Peraturan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 bahwa:
  - 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - 2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- 3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perhitungan tarif Pajak Hiburan Menurut Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Daftar jenis Hiburan**

<b>No</b>	<b>Jenis Hiburan</b>	<b>%</b>
1	Film, bioskop, pameran, akrobat, Sulap dan Pasar Malam.	10
2	Kebugaran,golf,permainan golf, bowling, pagelaran kesenian, pameran, musik dan sejenisnya.	20
3	Kontes kecantikan, binaraga, refleksi, mandi uap dan sejenisnya.	25
4	Diskotik, karaoke dan semacamnya.	30

## **2.2 Pajak Penerangan Jalan**

### **2.2.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan Pajak Penerangan Jalan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

### **2.2.2 Objek Pajak Penerangan Jalan**

#### **a. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.

#### **b. Bukan Objek Penerangan Jalan**

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### **2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Subjek Pajak Penerangan Jalan Menurut Rismansyah (2013:51), “orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan”.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN, sedangkan tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak

Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan. Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemugutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan tentang Pajak Penerangan Jalan.

#### **2.2.6 Tarif Pajak Penerangan Jalan**

- a. Untuk keperluan pelayanan rumah tangga:
  - Rumah tangga 1 A (450 VA dan 900 VA) sebesar 5%.
  - Rumah tangga 1 B (1300 VA) sebesar 6%.
  - Rumah tangga 2 (2200 VA s/d 6600 VA) sebesar 8%.
  - Rumah tangga 3 (>6600 VA) sebesar 10%.
- b. Untuk keperluan bisnis sebesar 10%.
- c. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5%

#### **2.2.8 Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan ada dua macam, yaitu:

1. Tenaga listrik yang disediakan PLN Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.
2. Tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN Sistem Pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **2.3 Pajak Reklame**

### **2.3.1 Definisi Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **2.3.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame**

#### **a. Objek Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 47. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*
2. Reklame kain
3. Reklame Melekat
4. Reklame Selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame suara
9. Reklame film/ *slide*
10. Reklame peragaan

#### **b. Bukan Objek Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 47. Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 48. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Secara sederhana, subjek pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang menikmati keuntungan dan menggunakan Reklame diberikan oleh pengusaha Reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan Reklame merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi Wajib Pajak.

### 2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 49. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

### 2.3.5 Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dalam Pasal 7. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jenis Reklame} \times \text{jumlah reklame} \times \text{indeks lokasi (nilai strategis)} \\ & \times \text{ukuran media reklame} \\ & \times \text{jangka waktu penyelenggaraan reklame} \end{aligned}$$

### 2.3.6 Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Sistem Pemungutan Pajak Reklame ada dua macam, yaitu:

1. Sistem Menghitung sendiri (*Self Assesment System*) adalah Wajib Pajak menghitung, Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyetor sendiri pajaknya.
2. Sistem Ketetapan (*Official Assesment System*) adalah Ketetapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan transaksi.

## 2.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

### 2.4.1 Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### **2.4.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

##### **a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 57. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **b. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 57. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/ gas.
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 58. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan Reklame merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi Wajib Pajak.

#### **2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 59. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Arti dari nilai pasar tersebut adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan, dalam hal ini produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **2.4.6 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 60. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah.

### **2.5 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

### **2.5.2 Peranan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 15 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya yang maksimal dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah tersebut serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

### **2.5.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu:

1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:
  - a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - b. Dana Perimbangan.
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pembiayaan bersumber dari:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  - b. Penerimaan pinjaman daerah
  - c. Dana cadangan daerah
  - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

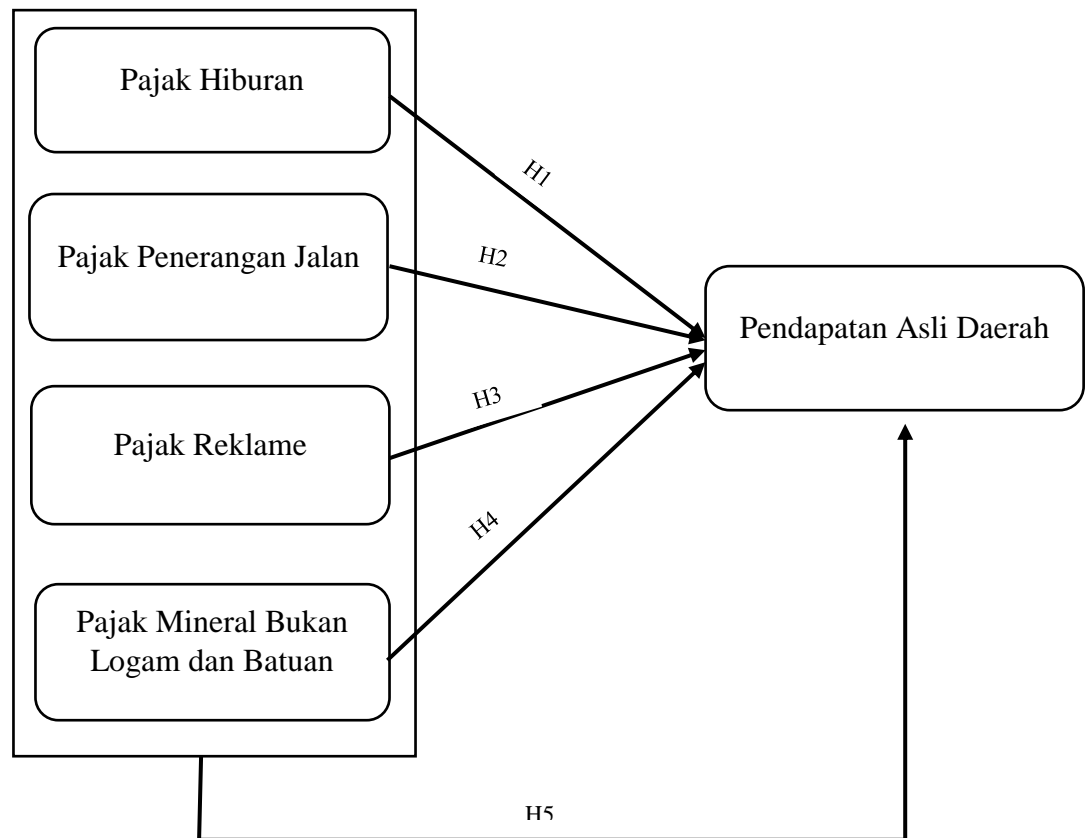
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
  - a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD).
  - b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara (BUMN).
  - c. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta.
4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
  - a. Hasil Penjualan Aset Daerah
  - b. Penerimaan Jasa Giro
  - c. Penerimaan Bunga Deposito
  - d. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

## 2.6 Keterkaitan Antar Variabel

Menurut Sugiono (2009:127). “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai riset”. Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Pendapatan Asli Daerah, baik secara parsial maupun simultan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan tersebut. Dengan demikian hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka penulis akan melihat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dengan demikian, penulis mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun laporan skripsi sehingga dapat lebih memadai.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian tentang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

N o	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Deny Razianti	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011- 2014	$X_1$ = Pajak Hotel $X_2$ = Pajak Hiburan $X_3$ = Pajak Restoran $X_4$ = Pajak Penerangan Jalan $X_5$ = Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan $X_6$ = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan $Y$ = Pendapatan Asli daerah	$X_1$ = Dari hasil pengujian parsial untuk variabel Pajak Hotel, menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. $X_2$ = Dari hasil pengujian parsial untuk variabel Pajak Hiburan, dinyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_3</math> = Dari hasil pengujian parsial untuk variabel Pajak Restoran, menunjukkan bahwa Pajak Restoran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_4</math> = Dari hasil pengujian parsial untuk variabel Pajak Pajak Penerangan Jalan, menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_5</math> = Dari hasil pengujian parsial untuk variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan</p>
--	--	--	--	--

				<p>Batuan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_6</math> = Dari hasil pengujian parsial Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>Y</math> = Dari hasil pengujian secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
2	Hadis Nirbeta	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran		<p><math>X_1</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Reklame, menyatakan</p>



		dan Pajak Parkis Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang		<p>bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_2</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Hotel, menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_3</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Hiburan, menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_4</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Penerangan Jalan, menyatakan bahwa Pajak Penerangan</p>
--	--	--	--	--

				<p>Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_5</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Restoran, menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_6</math> = Dari hasil pengujian secara simultan Pajak Parkir, menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>Y</math> = Dari hasil pengujian secara persial variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
--	--	--	--	---

3	Rosnah	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014	$X_1$ = Pajak Hotel $X_2$ = Pajak Penerangan Jalan $X_3$ = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan $X_4$ =Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan $X_5$ = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan $Y$ = Pendapatan Asli Daerah	$X_1$ = Dari hasil pengujian secara parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. $X_2$ = Dari hasil pengujian secara parsial Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. $X_3$ = Dari hasil pengujian secara parsial Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. $X_4$ = Dari hasil pengujian secara parsial Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
---	--------	---	---	--

				<p><math>X_5</math> = Dari hasil pengujian secara parsial Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>Y</math> = Dari hasil pengujian secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
4	Siti Rochimah Kharis Raharjo, SE, M.Si, AK Abrar Oemar, SE	Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012	<p><math>X_1</math> = Pajak Hotel &amp; Restoran</p> <p><math>X_2</math> = Retribusi Daerah</p> <p><math>X_3</math> = Pajak Daerah</p> <p><math>Y</math> = Pendapatan Asli daerah</p>	<p><math>X_1</math> = Dari hasil pengujian secara parsial Pajak Hotel &amp; Restoran tidak ada berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_2</math> = Dari hasil pengujian secara parsial Retribusi Daerah ada berpengaruh yang signifikan</p>

				<p>terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_3</math> = Dari hasil pengujian secara parsial dinyatakan bahwa ada berpengaruh yang signifikan dan positif antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
5	Iftakhur Rizqiyah	<p>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013)</p>	<p><math>X_1</math> = Pajak Hotel</p> <p><math>X_2</math> = Pajak Restoran</p> <p><math>X_3</math> = Pajak Hiburan</p> <p><math>X_4</math> = Pajak Reklame</p> <p><math>X_5</math> = Pajak Parkir</p> <p><math>Y</math> = Pendapatan Asli daerah</p>	<p><math>X_1</math> = Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara simultan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_2</math> = Terdapat pengaruh signifikan secara parsial Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli</p>

				<p>Daerah, namun secara simultan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_3</math> = Terdapat pengaruh signifikan secara persial Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara simultan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><math>X_4</math> = Tidak terdapat pengaruh signifikan secara persial Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara simultan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah</p> <p><math>X_5</math> = Tidak terdapat pengaruh</p>
--	--	--	--	---

				<p>signifikan</p> <p>secara persial</p> <p>Pajak Parkir</p> <p>terhadap</p> <p>Pendapatan Asli</p> <p>Daerah, namun</p> <p>secara simultan</p> <p>Pajak Parkir</p> <p>berpengaruh</p> <p>terhadap</p> <p>Pendapatan Asli</p> <p>Daerah.</p>
--	--	--	--	---

## 2.8 Hipotesis

Pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan komponen dari pajak daerah. Penerimaan pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak mineral akan memberikan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang penulis rumuskan adalah:

$H_1$  = Diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

$H_2$  = Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

$H_3$  = Diduga Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

$H_4$  = Diduga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.

$H_5$  = Diduga Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015.